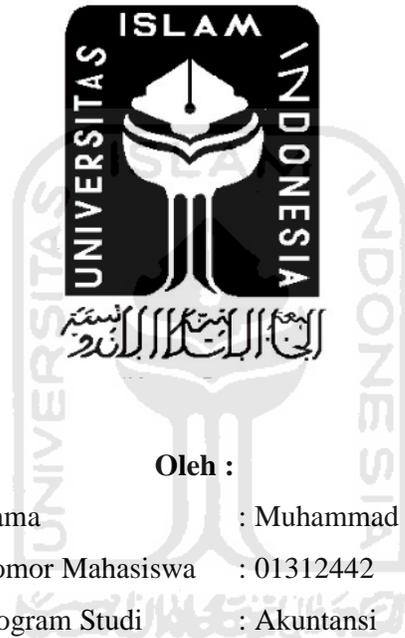


**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN  
SURPLUS ATAU DEFISIT TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN  
BELANJA MODAL**



Oleh :

Nama : Muhammad Arif T.C.W

Nomor Mahasiswa : 01312442

Program Studi : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Anggaran

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2011**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN  
SURPLUS ATAU DEFISIT TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN  
BELANJA MODAL**

**(Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali pada tahun 2003-2008)**

**SKRIPSI**

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh  
gelar Sarjana Srata-1 di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Islam Indonesia**



**Oleh :**

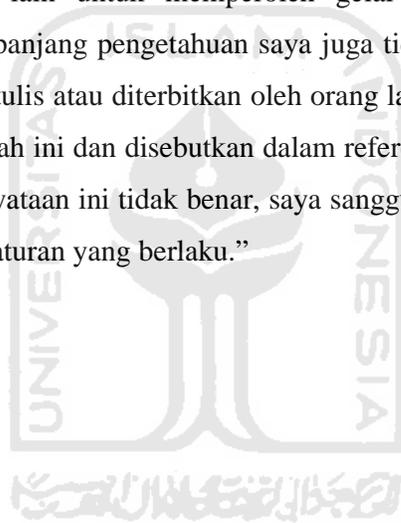
Nama : Muhammad Arif T.C.W  
Nomor Mahasiswa : 01312442  
Program Studi : Akuntansi  
Bidang Konsentrasi : Anggaran

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 20 Juni 2011

Penulis

**MUHAMMAD ARIF TRI CAHYO WIBOWO**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN  
SURPLUS ATAU DEFISIT TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN  
BELANJA MODAL**



Nama : MUHAMMAD ARIF  
Nomor Mahasiswa : 01312442  
Program Studi : Akuntansi  
Bidang Konsentrasi : Anggaran

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Telah Disetujui Dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing

(MAHMUDI, S.E, M.Si.)

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN  
SURPLUS ATAU DEFISIT TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN  
BELANJA MODAL**

Disusun Oleh : MUHAMMAD ARIF TRI CAHYO WIBOWO

Nomor Mahasiswa : 01312442

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada tanggal 20 Juli 2011

Penguji/Pem. Skripsi : Mahmudi ,S.E,M.Si .....

Penguji : .....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan surplus atau defisit terhadap belanja modal dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi, pendapat asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan surplus atau defisit mempengaruhi belanja modal suatu kabupaten atau kota secara empiris. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah se Jawa-Bali pada periode 2003-2008. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data primer, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampel penelitian ini adalah 39 Kabupaten dan kota se Jawa-bali. Teknik penarikan sampel menggunakan “*Metode Sampling*”, yaitu metode pengambilan sampel. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah kabupaten dan kota ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris berbeda di luar Jawa-Bali. Alat analisis yang digunakan adalah statistik regresi berganda (*multiple regression*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi besarnya belanja modal yang akan dialokasikan dalam APBD, (2) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah mempunyai dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, (3) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti besar kecilnya Dana Alokasi Umum mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, (4) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti besar kecilnya Dana Alokasi Khusus mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, (5) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Defisit/Surplus terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti besar kecilnya Surplus/defisit mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

## *Halaman Motto*

*“Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan?”*

*(QS Fathir [35]:37)*

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.”*

*(QS Ar-Rum [30]:30)*

*“Takkan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanyai tentang empat perkara;*

- tentang umurnya, untuk apa dihabiskan,*
- tentang masa mudanya, untuk apa dipergunakan,*
- tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa dibelanjakan,*
- tentang ilmunya, apa yang sudah diperbuatnya dengannya”*

*(HR Al-Turmudzi)*

*HALAMAN PERSEMBAHAN*



*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

☞ *Kedua Orangtuaku yang selalu sabar dan sayang kepada anak-anaknya*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr wb*

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini . Merupakan tingkatan akhir dalam pendidikan Strata-1 ini terselesaikan hanya karena ridha dan karunia Allah SWT, yang telah menciptakan dan menjaga pikiran dan raga ini untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam akan senantiasa diucapkan untuk rasul tercinta-Nya, Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini telah menjadi bagian sejarah hidup tersendiri bagi saya dengan melewati segala macam tantangan, hambatan dengan perasaan suka maupun duka. Dengan bantuan-Nya juga sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SURPLUS ATAU DEFISIT TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL” Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Keberhasilan dalam membuat penelitian ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan Rahmat, Hidayah dan Rizqi-Nya serta kesehatan kepadaku sehingga aku dapat memberikan yang terbaik bagi Umat.

2. Rasulullah Muhammad SAW, yang termulia diantara semua makhluk, diutus dengan membawa kebenaran dan petunjuk sebagai rahmat bagi seisi alam..
3. Bapakku tersayang dan ibuku tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan do'a untuk kesuksesanku.
4. Istriku tersayang dan tercinta yang selalu memberikan semangat, nasehat dan dorongan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs.H.Aasma'i Ishak, M.Bus., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Mahmudi, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan sampai terselesainya penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak pak untuk waktu, pemikiran, saran, dan "ketabahan" menghadapi saya.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitain ini.

Akhirnya penyusun sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi semua pihak yang menggunakan laporan ini.

**Wassalamu alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 20 Juni 2011  
Penulis

(Muhammmad Arif tri Cahyo Wibowo)

# Daftar Isi

Halaman Sampul Depan Skripsi.....	i
Halaman Judul Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	v
Abstraksi.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Lampiran.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematis Penulisan.....	9
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori Dan Kajian Pustaka.....	11
2.1.1 Pengertian Pendapatan.....	11
2.1.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2.1.3 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU).....	19
2.1.4 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK).....	22
2.1.5 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.1.6 Pengertian Belanja Modal.....	26
2.1.7 Pengertian Surplus/Defisit.....	34
2.1.8 Pengertian Pembiayaan.....	35

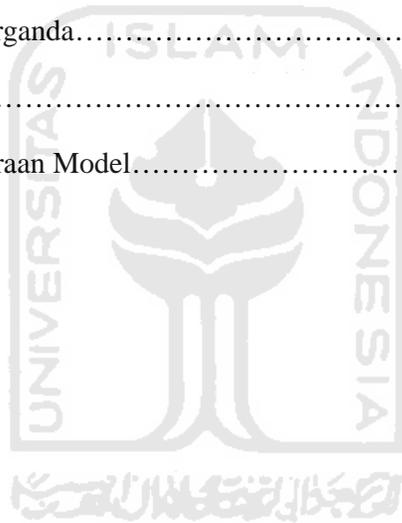
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Perumusan Hipotesis.....	38
2.4 Model Penelitian.....	44
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Data Penelitian.....	46
3.1.1 Populasi dan Sampel.....	46
3.1.2 Data dan Sumber Data.....	47
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.2 Definisi Dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	47
3.3 Analisis Data.....	49
3.4 Model Empiris Dan Hipotesis Statistik.....	53
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	54
<b>BAB IV. Hasil Analisis</b>	
4.1 Analisis Deskriptif.....	59
4.2 Analisis Statistik.....	60
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.4 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model ( <i>Goodness of Fit Test</i> )...	68
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	74
5.3 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Tabel Analisis Descriptives.....	59
4.2 Gambar Hasil Uji Normalitas.....	61
4.3 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas.....	62
4.4 Tabel Hasil Uji Autokorelasi.....	63
4.5 Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas.....	64
4.6 Tabel Analisis Regresi Linier Berganda.....	64
4.7 Tabel Pengujian Secara Serentak.....	68
4.8 Tabel Pengujian Ketepatan Perkiraan Model.....	69



## LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Hasil Analisis Descriptive Statistic.....	81
Hasil Analisis Regression.....	82
Tabel Durbin-Watson Statistic.....	85
Tabel Pertumbuhan Ekonomi.....	86
Tabel Pendapatan Asli Daerah.....	87
Tabel Dana Alokasi Umum.....	88
Tabel Dana Alokasi Khusus.....	89
Tabel Surplus/Defisit.....	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara

implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang

akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi

melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga

pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public yang akan digunakan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada saat sekarang ini maupun untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SURPLUS ATAU DEFISIT TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
4. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
5. Apakah surplus/defisit berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk:

1. Membrikan bukti secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran Belanja Modal.
2. Memberikan bukti secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran Belanja Modal.
3. Memberikan bukti secara empiris pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal.
4. Memberikan bukti secara empiris pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap anggaran Belanja Modal.
5. Memberikan bukti secara empiris pengaruh surplus/defisit terhadap anggaran Belanja Modal.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak diantaranya berupa:

1. Kontribusi Empiris

Untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Kontribusi Teori

Bagi pendidikan akuntansi dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan ilmu akuntansi.

3. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para mahasiswa lain sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan surplus/defisit terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

4. Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan surplus/defisit terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Merupakan titik tolak penulisan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori dan Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang penjelasan dan pembahasan secara rinci landasan teori sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

### **Bab IV : Analisis dan Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan tentang analisis yang digunakan adalah data panel (*pooled data*) yang telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi yaitu : uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastis, uji otokorelasi, serta pembahasannya.

## **Bab V : Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian ini dibahas lebih mendalam mengenai teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang menjelaskan pengertian Pendapatan, Anggaran daerah Sektor Publik, Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia, Belanja Modal, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan teori yang menjelaskan hubungan dari beberapa variabel tersebut berupa hasil penemuan terdahulu yang menjadi landasan teori dan sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti.

#### **2 Struktur APBD**

Struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja modal, surplus/defisit, pembiayaan, dan silpa.

##### **2.1.1 Pendapatan**

Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan lain aktiva sebuah entitas atau pelunasan utang (atau kombinasi keduanya) dari pemberian jasa atau aktiva lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut.

##### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan dan penerimaan dari sumber ekonomi asli yang ada di daerah.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah: *“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”*.

Pendapatan asli daerah ini dipisahkan menjadi empat jenis yaitu :

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

## **1. *Pendapatan Pajak Daerah***

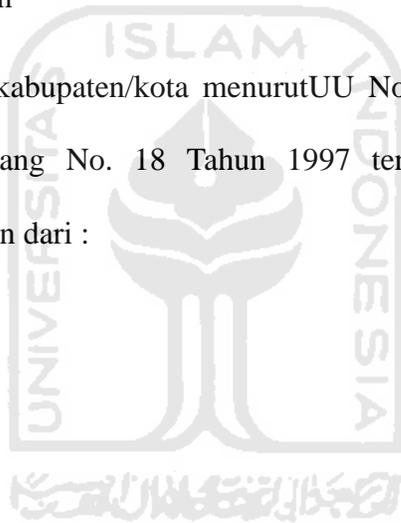
### **a. Pengertian**

Perkiraan *Pendapatan Pajak Daerah* ini untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan dan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan ini meliputi :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Kendaraan di Atas Air
- e) Pajak Air di Bawah Tanah
- f) Pajak Air permukaan

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersusun dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir



## **2. Pendapatan Retribusi Daerah**

### **a. Pengertian**

Perkiraan *Pendapatan Restribusi Daerah* ini untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. Penerimaan ini meliputi :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- d) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- e) Retribusi izin trayek kendaraan penumpang
- f) Retribusi air
- g) Retribusi jembatan timbang
- h) Retribusi kelebihan muatan
- i) Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian

## **3. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainn**

### **a. Pengertian**

Perkiraan *Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya* ini untuk

menampung pendapatan yang berasal dari Bagian Laba dari BUMD dan Investasi Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

#### **4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah**

##### **a. Pengertian**

Perkiraan *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah* ini untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, dan Bagian Laba dari BUMD dan Investasi Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan dan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Penerimaan ini berasal dari :

- a) Hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman.
- b) Penerimaan jasa giro.

**PAD dapat bersumber dari:**

**1. Pajak Daerah;** yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public.

**2. Retribusi Daerah;** yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

**3. Perusahaan Daerah;** Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Dalam penjelasan umum UU No. 5/1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai “*suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah*”. Dari kutipan diatas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah.

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi

maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.

**4. Lain-Lain PAD yang Sah;** Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. sebenarnya, jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak

yang cukup besar. Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang No 32 tahun 2004 dan undang-undang No 33 tahun 2004 pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih nyata dan sangat luas dalam mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya. Dalam mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang sangat besar untuk mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.

### **2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang

panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Dana Alokasi Umum terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah *ketimpangan horizontal* (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Berdasarkan hasil rapat kerja Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR RI tanggal 08 Oktober 2007, telah disepakati alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyeimbang DAU untuk Tahun Anggaran 2008. Alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sistem hubungan keuangan

pusat daerah adalah bagian dari sistem fiskal. Sebagai sebuah instrumen, sistem hubungan keuangan pusat daerah berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepada pemerintah daerah sebagian dari penerimaan pajak nasional.

Hal itu dilakukan dengan cara transfer dari anggaran pemerintah pusat ke anggaran pemerintah daerah. DAU dengan demikian merupakan bagian dari mekanisme redistribusi yang karenanya prinsip keadilan harus merupakan komponen terpenting dalam tujuan alokasi. Karena DAU merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran pemerintah daerah, maka cara perhitungan jumlah dana yang akan dialokasikan, metode distribusi, dan mekanisme administrasi menjadi sangat penting untuk diketahui secara transparan oleh pemerintah daerah. Perlu diingatkan bahwa karena DAU adalah transfer dana dari satu tingkat pemerintah ke tingkat pemerintah lainnya maka pengaruh langsung DAU sebenarnya terbatas pada sektor publik. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah.

Dalam hal ini, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi. Sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu berespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. Dengan demikian dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah Daerah yang bersangkutan. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun yaitu kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis

investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh Daerah tersebut dapat berbentuk rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya. Meskipun DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pemanfaatannya, pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur departemen yang memperoleh alokasi DAK.

DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004). Sekitar 80% DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai pemda. Oleh sebab itu, sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik adalah dari DAK. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini,

apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing

Tujuan pengalokasian DAK antara lain adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah serta pelayanan antarsektor. Sejak 2006, ada tujuh bidang pelayanan pemerintahan yang mendapatkan DAK, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana jalan, irigasi, dan air bersih), prasarana pemerintahan, pertanian, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup. Di antara ketujuh bidang itu, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan selalu mendapat porsi DAK terbanyak.

#### **2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *economic growth* mengandung pengertian proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita

dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “*output perkapita*”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi

yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000:57).

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat . Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, infra struktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya. Dalam analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto.

#### **2.1.6 Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset atau merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan (Abdul Halim, 2002).

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **5. Belanja Modal Fisik Lainnya**

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Abdul Halim belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja public, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik : pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.

2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur : pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah, dan pembangunan rumah dinas.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja dalam tatanan akuntansi pemerintah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Menurut Halim (2004a:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang

bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992).

Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan perasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Belanja modal, terutama infrastruktur sangat tergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan. Belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*).

Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

- Aset Tetap Lainnya; dan
- Konstruksi dalam Pengerjaan.

#### Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan asset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya

perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Modal yang dilaksanakan secara swakelola dan memiliki output berupa aset tetap, seluruh pengeluaran termasuk upah, perjalanan dinas, dan bahan-bahan/asistensi diakui sebagai aset tetap. Belanja Modal yang dikeluarkan untuk tujuan pembentukan barang modal yang masa pembangunannya belum selesai sampai pada saat tanggal laporan keuangan diakui sebagai aset tetap dalam kelompok konstruksi dalam pengerjaan dan diberikan penjelasan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (*fixed asset*) pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau *output*-nya sudah diperoleh. Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam perspektif manajemen keuangan dan akuntansi, selain diperhitungkan

*cost* untuk penggunaan aset tersebut dalam operasional organisasi dalam bentuk depresiasi, juga harus diperhitungkan *cost* untuk pemeliharaan aset tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kegunaannya. Biaya pemeliharaan dikeluarkan secara rutin atau terjadi berulang-ulang setiap tahun (*recurrent*) atas aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

### **2.1.7 Surplus/Defisit**

Surplus adalah kenaikan ekuitas dari transaksi2 tambahan atau insidental entitas dan dari semua transaksi lainnya atau kejadian2 serta keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi entitas. Defisit adalah penurunan ekuitas dari transaksi2 tambahan atau insidental entitas dan dari semua transaksi lainnya dan dari kejadian serta keadaan2 lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali yang berasal dari biaya atau kerugian yang ditanggung entitas. Surplus/defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Laporan surplus defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (dalam satu periode akuntansi). Kinerja dalam hal ini digambarkan sebagai kemampuan suatu entitas dalam menciptakan pendapatan. Laporan keuangan jenis ini memuat kinerja suatu entitas dalam satu periode, misalnya satu tahun. Keuntungan dan kerugian entitas selama satu tahun itu. Dalam akuntansi surplus atau defisit merupakan selisih dari seluruh pendapatan dan seluruh biaya. Ketika total pendapatan lebih besar dari total biaya, maka terjadi

surplus. Ketika total biaya lebih besar daripada total pendapatan maka yang terjadi adalah defisit.

$$\text{SURPLUS/DEFISIT} = \text{PENDAPATAN} - \text{BELANJA}$$

### **2.1.8 Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan investasi permanen (divestasi), dan dari penarikan pinjaman. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Pembiayaan dikategorikan menjadi 2, yaitu: 1) penerimaan pembiayaan dan 2) pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran di catat dalam pos pembiayaan neto.

#### **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

1. Penggunaan SiLPA tahun lalu
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
5. Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6. Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank
7. Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
8. Pinjaman Dalam Negeri – Pengeluaran Obligasi Pemerintah Daerah
9. Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
10. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
11. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
12. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Lainnya

#### **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
4. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
7. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pemerintah Pusat

8. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
9. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
10. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
11. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bukti bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal mempunyai efek positif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Penelitian lainnya juga melaporkan bahwa hubungan tersebut positif (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004). Penelitian yang menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya* (Smith dan Bertozzi, 1998; Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002). Penelitian yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD kedalam belanja sektoral (Abdullah, 2004; Colombatto, 2001). Penelitian yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

## **2.2 Perumusan Hipotesis**

### **2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara (Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002), secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*.

Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran

Belanja Modal

### 2.2.2 Pendapatan Asli Daerah dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*.

Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral.

Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Temuan ini mengkonfirmasi pendapat Colombatto (2001). Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

### **2.2.3 Dana Alokasi Umum dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut

merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

#### **2.2.4 Dana Alokasi Khusus dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah.

Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004).

H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

#### **2.2.5 Surplus/Defisit dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Surplus adalah kenaikan ekuitas dari transaksi2 tambahan atau insidentil entitas dan dari semua transaksi lainnya atau kejadian2 serta keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi entitas. Defisit adalah penurunan ekuitas dari transaksi2 tambahan atau insidentil entitas dan dari semua transaksi lainnya dan dari kejadian serta keadaan2 lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali yang berasal dari biaya atau kerugian yang ditanggung entitas. Surplus/defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Laporan surplus defisit adalah laporan yang

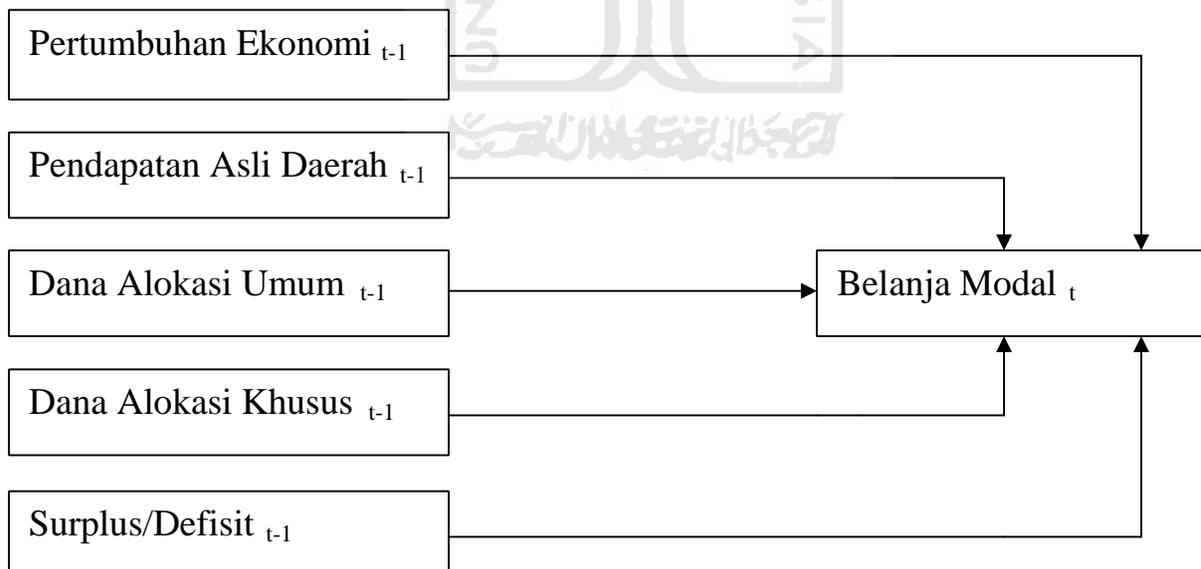
menggambarkan kinerja keuangan entitas (dalam satu periode akuntansi). Kinerja dalam hal ini digambarkan sebagai kemampuan suatu entitas dalam menciptakan pendapatan.

H5 : Surplus/Defisit berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

#### 2.4 Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan surplus/defisit sebagai variabel independen berpengaruh langsung terhadap belanja modal sebagai variabel dependen.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Data Penelitian**

##### **3.1.1 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali dari tahun 2003 – 2008 dengan alasan ketersediaan data. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data primer, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2007). Sampel pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali pada tahun 2003-2008. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah kabupaten dan kota ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris berbeda di luar Jawa-Bali.

### **3.1.2 Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa media perantara. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku dan literatur yang mendukung.

### **3.1.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS) dan meminta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dan membuka situs internet yang berisi tentang Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Cara ini dinilai paling efektif untuk mendapatkan data penelitian dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan keaslian data.

## **3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Variabel-variabel penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen (variabel terikat) = variabel Z yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yang mencerminkan belanja modal.

2. Variabel independen (variabel bebas) = variabel yang mempengaruhi tingkat belanja modal.

Berikut ini akan diuraikan definisi variabel-variabel penelitian, yaitu :

1. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur apakah kabupaten dan kota tersebut memiliki aset atau kekayaan.
2. Variable independen atau variable bebas terdiri dari 6 variabel, yaitu:
  - a) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita.
  - b) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
  - c) Dana alokasi umum adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
  - d) Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

- e) Surplus/Defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit.

### 3.3 Analisis Data

#### 1. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan metode statistik regresi berganda (*multiple regression*). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Persamaan regresi adalah :

$$Y_{t+1} = \alpha + \beta_1 PDRB_t + \beta_2 PAD_t + \beta_3 DAU_t + \beta_4 DAK_t + \beta_5 \text{Surplus/Defisit}_t + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

a = Konstanta

b = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

Surplus/Defisit

e = *error*

Belanja modal merupakan variabel dependen diprediksi dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, yaitu: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

## **2. Metode Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis menggunakan data panel bertujuan untuk melihat pengaruh variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi pengujian secara parsial dan simultan.

### **2.1 Pengujian Parsial**

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen (X) secara individu dengan variabel dependen (Y). Untuk melakukan uji t dari regresi linier berganda dilakukan dengan menentukan nilai kritis terlebih dahulu. Yaitu dengan menentukan nilai t hitung tabel dengan t tabel. Tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% atau 0,05 dengan tingkat kebebasan 95%. Pada uji t ini ditentukan nilai t tabel dengan melihat tabel distribusi t dan nilai t hitung dicari dengan menghitung dengan program *SPSS for Windows*.

Keputusan menerima atau menolak hipotesis dapat dilakukan melalui kriteria-kriteria berikut:

1. Jika  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel dengan taraf nyata yang dipilih, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan tingkat kepercayaan tertentu. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Belanja Modal* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Belanja Modal*.
2. Bila  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel dengan taraf nyata dipilih, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan tingkat kepercayaan tertentu. Ini berarti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Belanja Modal* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Belanja Modal*.

Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## 2.2 Pengujian secara Simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel

independen secara bersama-sama/agregat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat kebebasan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% atau 0,05 dengan tingkat kebebasan 95%. Pada uji F ini ditentukan nilai F tabel dengan melihat tabel distribusi F dan nilai F hitung dicari dengan menghitung dengan program *SPSS for Windows*.

Kriteria mengenai penerimaan atau penolakan hipotesa dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkat kepercayaan tertentu dan taraf nyata yang dipilih, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Ini berarti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Belanja Modal* secara agregat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Belanja Modal*.
2. Bila F hitung lebih kecil dari F tabel pada tingkat kepercayaan tertentu dan taraf nyata yang dipilih, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Yang berarti kelima faktor tersebut secara agregat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Belanja Modal*.

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 2.3 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square).

### 3.4 Model Empiris dan Hipotesis Statistik

Adapun model empiris dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_0 1 : \beta_1 = 0$  : Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat *Belanja Modal*.  
 $H_a 1 : \beta_1 > 0$  : Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat *Belanja Modal*.
2.  $H_0 2 : \beta_2 = 0$  : Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat *Belanja Modal*.  
 $H_a 2 : \beta_2 < 0$  : Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat *Belanja Modal*.
3.  $H_0 3 : \beta_3 = 0$  : Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat *Belanja Modal*.  
 $H_a 3 : \beta_3 < 0$  : Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif terhadap *Belanja Modal*.

4. Ho 4 :  $\beta_4 = 0$  : Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat *Belanja Modal*.

Ho 4 :  $\beta_4 < 0$  : Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif terhadap *Belanja Modal*.

5. Ho 5 :  $\beta_5 = 0$  : Surplus/Defisit tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat *Belanja Modal*.

Ho 5 :  $\beta_5 < 0$  : Surplus/Defisit mempunyai pengaruh negatif terhadap *Belanja Modal*.

## 5.5 Uji Asumsi Klasik

Uji ini berkaitan erat dengan ada tidaknya multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas data. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik tersebut.

### 5.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya. Multikolinieritas berarti antar variabel independen yang ada dalam model regresi, memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan sama dengan satu). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang terdapat pada masing-masing variabel. Terjadi jika nilai

*Tolerance*-nya  $< 0,10$  atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $> 10$  (Gujarati, 1997 dalam Aida dan Listianingsih, 2005).

### 5.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum (Gujarati, 1997 dalam Gunawan: 148). Uji autokorelasi dilakukan dengan Durbin-Watson Test dan masalah autokorelasi tidak terjadi jika nilai D-W berada pada daerah  $du < D-W < 4-du$  berdasarkan tabel D-W (Ghozali, 2005: 95-96). Namun demikian secara umum bisa diambil patokan sebagai berikut :

- Angka D-W di bawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W di antara  $-2$  sampai  $+2$ , berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W di atas  $+2$  berarti ada autokorelasi negatif.

Adanya autokorelasi dan standar error yang besar menyebabkan terjadinya bias atau penyimpangan yaitu dengan cara membandingkan nilai  $t$ -hitung dengan tabel standarized normal distribution.

### 5.5.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah asumsi yang berkaitan dengan dependensi hubungan antar variabel. Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi adanya Heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang diprediksi, dan sumbu Y adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas berarti bahwa dalam variabel terikat menunjukkan tingkat varian yang berbeda antar variabel prediktor.

#### **5.5.4 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.



## **BAB IV**

### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali Periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan surplus/defisit terhadap belanja modal.

Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis Regresi Linier Berganda.

#### 4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut

:

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif  
(dalam ribuan rupiah)

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	195	6.378.733,00	564.433.606,00	91.076.663,53	80.738.592,96
LAJU_PDRB	195	0,25	7,32	4,73	1,13
PAD	195	6.921.533,00	249.063.806,00	42.883.648,60	33.875.828,43
DAU	195	87.420.000,00	1.351.912.000,00	315.759.605,06	188.907.421,63
DAK	195	99.995,00	71.319.041,00	16.611.430,02	14.258.758,08
SURPLUS/DEFISIT	195	-252.319.645,00	238.509.228,00	5.884.532,33	44.766.404,14
Valid N (listwise)	195				

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah kabupaten yang menjadi sampel adalah 39 kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Nilai rata-rata Belanja modal adalah sebesar Rp. 91.076.663,53 ribu dan standar deviasi sebesar Rp. 80.738.592,96. Nilai Belanja modal tertinggi adalah Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 564.433.606 ribu dan nilai terendah adalah kota Surakarta pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp.6.378.733 ribu. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Tangerang merupakan kota industri di Pulau Jawa, sehingga memiliki belanja modal yang lebih besar baik untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik.

Deskriptif terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata sebesar Rp. 4,73ribu dan standar deviasi sebesar 1,13. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.7,05 ribu dan Pertumbuhan Ekonomi terendah terjadi di kota Kediri tahun 2005 yaitu sebesar Rp.0,25 ribu.

Deskriptif terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar Rp. 42.883.648,60 ribu dan standar deviasi sebesar 33.875.828,43. PAD tertinggi terjadi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 285.899.513 ribu.

Hasil deskriptif terhadap DAU memiliki rata-rata sebesar Rp. 315.759.605,06 ribu dan standar deviasi sebesar 188.907.421,63. DAU tertinggi terjadi di Kabupaten Bandung pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.1.351.912.000 ribu. Sedangkan Hasil deskriptif terhadap DAK memiliki rata-rata sebesar Rp. 16.611.430,02 ribu dan standar deviasi sebesar 14.258.758,08. DAK tertinggi terjadi di Kabupaten Garut pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp.96.486.000 ribu.

Hasil deskriptif terhadap defisit yaitu selisih antara pendapatan dan belanja rata-rata sebesar 5.884.532,33. Surplus tertinggi terjadi pada Kabupaten Tangerang tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 252.231.316,00 ribu, sedangkan defisit terendah terjadi di kota Surakarta tahun 2008 yaitu sebesar -Rp. 343.157.161,00 ribu. Hal ini berarti Tangerang memiliki pembelanjaan yang paling rendah, dibandingkan dengan besarnya pendapatan daerah, sedangkan kota Surakarta memiliki pembelanjaan paling besar sehingga melebihi nilai pendapatan daerah.

## **4.2. Analisis Statistik**

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*). Hasil model analisis data ini telah lolos telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastis, otokorelasi.

### **4.2.1. Uji Asumsi Klasik**

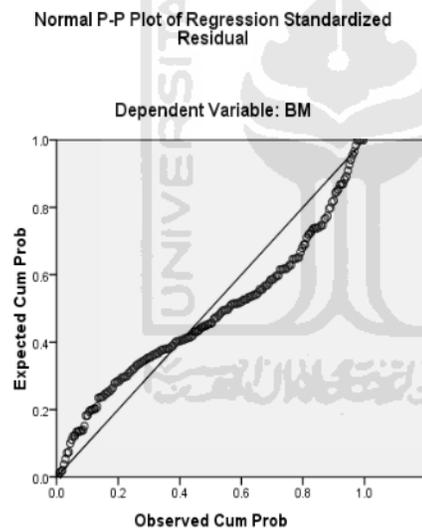
Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan

heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

#### a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal

Hasil Uji Normalitas tersebut dapat di tampilkan pada gambar berikut:



Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.2 diatas dapat diketahui jika grafik histogram menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear dan memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

## b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) di atas 10 (Ghozali, 2001). Tabel di bawah menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas yang terjadi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan Defisit dimana nilai *tolerance*-nya di atas 0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa antarvariabel-variabel tersebut tidak terdapat korelasi sehingga tidak terjadi gejala multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 LAJU_PDRB	.898	1.114
PAD	.583	1.716
DAU	.520	1.923
DAK	.747	1.339
SURPLUS/DEFISI T	.877	1.140

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011

## c. Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model Durbin-Watson (*dw test*). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana

variable *error-term* pada periode tertentu berkorelasi dengan variable *error-term* pada periode lain yang bermakna variabel *error-term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat. Langkah pendeteksian adanya autokorelasi adalah dengan membandingkan nilai Durbin-watson statistic tabel.

Berdasarkan  $N= 195$  dan  $k= 5$  diperoleh nilai tabel  $DWL = 1,665$  dan  $DWU=1,802$ , sehingga nilai  $4-DWU = 2,198$  dan  $4-DWL = 2,335$ .

Hasil Uji Durbin Watson dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.4  
Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 <sup>a</sup>	.558	.546	5.44046E7	1.996

a. Predictors: (Constant), SURPLUS/DEFISIT, LAJU\_PDRB, DAK, PAD, DAU

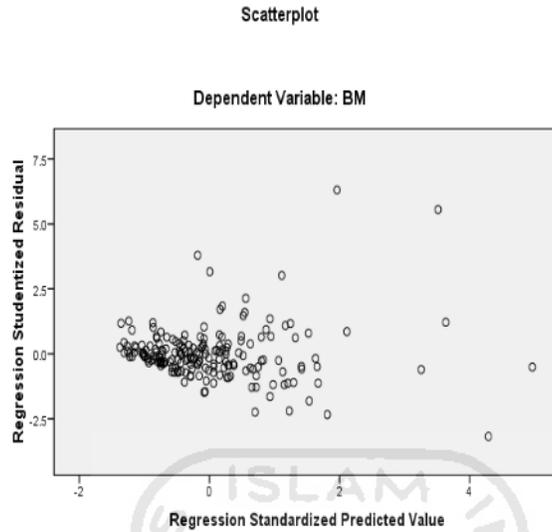
b. Dependent Variable: BM

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson berada pada daerah antara DWU sampai dengan 4-DWU ( $1,802 < 1,996 < 2,198$ ) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

**Gambar 4.5**  
**Scatterplot untuk uji heterokedastisitas**



**4.2.2. Analisis Regresi Linier Berganda**

Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Defisit dan SiLPA terhadap Belanja daerah digunakan analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Var. Independent	Koef. Regresi	Std. Error	t hitung	Sig-t	F stat.	Sig.F	Adj. R2
(Constant)	-47.680.000	17.850.000	-2.672	.008	47.652	.000	.546
PE	9401010.477	3647502.222	2.577	.011			
PAD	.793	.151	5.249	.000			
DAU	.134	.029	4.672	.000			
DAK	.996	.317	3.141	.002			
DEFISIT	.251	.093	2.695	.008			

Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder diolah, 2011

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y_{t+1} = \alpha + \beta_1 \text{Pertumbuhan Ekonomi}_t + \beta_2 \text{PAD}_t + \beta_3 \text{DAU}_t + \beta_4 \text{DAK}_t + \beta_5 \text{Surplus/Defisit}_t + e \quad (1)$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

a = Konstanta

b = Slope atau koefisien regresi atau intersep

Pertumbuhan Ekonomi = Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

Surplus/Defisit

e = *error*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat ditulis persamaan regresi :

$$Y = 47.680.000 - 17.850.000 \text{ PE} + 0.793 \text{ PAD} + 0.134 \text{ DAU} - 0.996 \text{ DAK} + 0.251 \text{ DEFISIT}.$$

Nilai konstanta sebesar -47.680.000 menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan Defisit sama dengan nol, maka diestimasikan besarnya Belanja Daerah di Propinsi Se Jawa-Bali adalah sebesar Rp. 47.680.000 ribu.

Sedangkan koefisien regresi untuk Pertumbuhan Ekonomi adalah positif sebesar 9401010.477 yang berarti setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 juta rupiah akan diikuti dengan peningkatan belanja modal di kabupaten / kota Jawa-Bali sebesar 9401010.477 juta rupiah. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkata pada belanja daerah, dan sebaliknya penurunan pada

pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan belanja modal.

Hasil koefisien regresi untuk PAD adalah positif sebesar 0.793 yang berarti setiap peningkatan PAD sebesar 1 juta rupiah akan diikuti dengan peningkatan belanja modal di kabupaten / kota sepropinsi Jawa-Bali sebesar 0.793 juta rupiah. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan PAD akan menyebabkan peningkatan pada belanja daerah, dan sebaliknya penurunan pada PAD akan diikuti dengan penurunan belanja modal.

Hasil koefisien regresi untuk DAU adalah positif sebesar 0.134 yang berarti setiap peningkatan DAU sebesar 1 juta rupiah akan diikuti dengan peningkatan belanja modal di kabupaten / kota sepropinsi Jawa-Bali sebesar 0.134 juta rupiah. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan DAU akan menyebabkan peningkatan pada belanja daerah, dan sebaliknya penurunan pada DAU akan diikuti dengan penurunan belanja modal.

Hasil koefisien regresi untuk DAK adalah positif sebesar 0.996 yang berarti setiap peningkatan DAK sebesar 1 juta rupiah akan diikuti dengan penurunan belanja modal di kabupaten / kota sepropinsi Jawa-Bali sebesar 0.996 juta rupiah. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan DAK akan menyebabkan peningkatan pada belanja daerah, dan sebaliknya penurunan pada DAK juga akan diikuti dengan penurunan belanja modal.

Hasil koefisien regresi untuk Defisit adalah positif sebesar 0.251 yang berarti setiap peningkatan Defisit sebesar 1 juta rupiah akan diikuti dengan peningkatan belanja modal di kabupaten / kota sepropinsi Jawa-Bali sebesar 0.251 juta rupiah. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan Defisit akan menyebabkan peningkatan pada belanja daerah, dan sebaliknya penurunan pada Defisit akan diikuti dengan penurunan belanja modal.

Hasil perhitungan statistik seperti pada Tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa dari keempat variabel yang dimasukkan dalam model berpengaruh signifikan mempengaruhi *belanja modal*.

Untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,577 dan sig.t sebesar  $0,011 < 0,05$ , yang berarti terdapat pengaruh positif tingkat pertumbuhan ekonomi secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Dengan demikian Hipotesis pertama dalam penelitian ini **dapat didukung**.

Untuk variabel PAD diperoleh nilai t hitung sebesar 5,249 dan sig.t sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Dengan demikian **Hipotesis kedua dalam penelitian ini didukung**.

Untuk variabel DAU diperoleh nilai t hitung sebesar 4,672 dan sig.t sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Dengan demikian **Hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat didukung**.

Untuk variabel DAK diperoleh nilai t hitung sebesar 3,141 dan sig.t sebesar  $0,002 < 0,05$ , yang berarti terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Dengan demikian **Hipotesis keempat dalam penelitian ini didukung**.

Untuk variabel Defisit diperoleh nilai t hitung sebesar 2,695 dan sig.t sebesar  $0,008 < 0,05$ , yang berarti terdapat pengaruh positif Defisit secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Dengan demikian **Hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat didukung**.

### 4.2.3 Pengujian Secara Serentak

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

**Tabel 4.7**  
**Pengujian Hipotesis secara Simultan**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.052E17	5	1.410E17	47.652	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.594E17	189	2.960E15		
	Total	1.265E18	194			

a. Predictors: (Constant), SURPLUS/DEFISIT, LAJU\_PDRB, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Tabel 4.7 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan Defisit berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD.

### 4.2.4 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan nilai koefisien determinasi (adjusted R-square) sebesar 0,546 yang berarti model dapat menjelaskan variasi belanja modal sebesar 54 persen dan sisanya sebesar 46 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Hasil pengujian Goodness of Fit dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square
1	.747(a)	.558	.546

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis pertama, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten / kota se Jawa-Bali. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Hasil pengujian hipotesis kedua juga menemukan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kota/kabupaten Se Jawa-Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula sumber dana yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga memberikan stimulus untuk meningkatkan Belajar Modal. Belanja modal terbagi dalam belanja untuk aparatur dan belanja pelayanan publik, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja jalan, jalan bebas hambatan (highway), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum, dan sebagainya. Jadi semakin besar Pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Dengan demikian besarnya Dana Alokasi Umum, akan mempengaruhi besarnya anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modalnya.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini

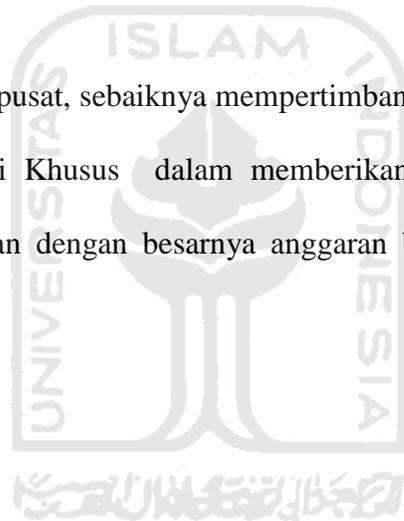
disebabkan karena Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional.

Hasil pengujian hipotesis Kelima menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan Defisit terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena Surplus adalah kenaikan ekuitas dari transaksi<sup>2</sup> tambahan atau insidentil entitas dan dari semua transaksi lainnya atau kejadian<sup>2</sup> serta keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi entitas. Defisit adalah penurunan ekuitas dari transaksi<sup>2</sup> tambahan atau insidentil entitas dan dari semua transaksi lainnya dan dari kejadian serta keadaan<sup>2</sup> lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali yang berasal dari biaya atau kerugian yang ditanggung entitas. Surplus/defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Laporan surplus defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (dalam satu periode akuntansi). Kinerja dalam hal ini digambarkan sebagai kemampuan suatu entitas dalam menciptakan pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dijadikan sebagai preference bagi manajer pelayanan publik, terutama bagi pemerintah daerah dalam membuat anggaran daerah, yaitu pada Belanja Modal untuk tahun kedepan. Untuk itu dalam memperhitungkan besarnya

anggaran untuk Belanja Modal hendaknya perlu memperhatikan nilai PAD yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Hal ini penting karena besarnya PAD sangat berhubungan erat dengan belanja modal. Selain itu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat juga dijadikan secara optimal dalam menganggarkan belanja modal daerah. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Untuk itu bagi pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing dalam menentukan anggaran. Kebijakan ini penting karena dalam pelaksanaannya masih terdapat nilai surplus / defisit antara pendapatan daerah dengan pembelanjaan.

Selain itu bagi pemerintah pusat, sebaiknya mempertimbangkan kembali besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, agar disesuaikan dengan besarnya anggaran belanja pada masing-masing pemerintah daerah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi besarnya belanja modal yang akan dialokasikan dalam APBD.
2. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah mempunyai dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
3. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti besar kecilnya Dana Alokasi Umum mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
4. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini berarti besar kecilnya Dana Alokasi Khusus mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

5. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Defisit/Surplus terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota Se Jawa-Bali. Hal ini besar kecilnya Surplus/defisit mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Temuan-temuan dalam kasus ini menunjukkan beberapa hal yang sangat teoritis dapat dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih jauh. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Karena studi ini belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya aspek kebijakan publiknya, aspek politisnya, aspek manajemen keuangannya, aspek penganggaran daerah, aspek psikologis personalitas pembuat keputusan pemda.

## **5.3. Saran**

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten / Kota Se Jawa-Bali hendaknya dalam melakukan eksploitasi Pendapatan Asli Daerah hendaknya lebih proporsional dan disesuaikan dengan besarnya belanja untuk pelayanan publik, sehingga pendapatan yang diterima dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Besarnya anggaran Belanja Modal ini hendaknya pula disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah

dan besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat.

2. Pemerintah daerah hendaknya lebih menerapkan sistem *good governance*, sehingga dalam implementasi belanja modal dapat dikontrol dengan baik dari penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan manipulasi anggaran, sehingga pelaksanaannya benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya adalah penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi

## Daftar Pustaka

Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih.

Bapekki Depkeu

Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Blad & Nunn. 1992. Pemerolehan asset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Brata, 2004. Pengaruh PAD dan Bagian Sumbangan dan Bagian terhadap Belanja Modal.

Brodjonegoro, Bambang dan Nurkholis, 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Antar Daerah: Analisa Model IRIO, Indonesia, *Journal of Economic and Development*, Vol 3 No.2. Jan 2003, KANOPI (Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia) Universitas Indonesia.

Colombatto, Enrico. 2001. Discretionary power, rent-seeking and corruption. University di Torino & ICER, working paper.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*". Simposium Nasional Akuntansi. Juli. Makassar

- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting—Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Gujarati, D. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Hunter. & Shah.1998. Desentralisasi memiliki korelasi positif dengan kualitas pemerintah, kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi – FE UGM.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. Yogyakarta. Hal : 127-146.
- Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Disertasi.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.

- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1985. *Intertempora Analysis of State AnLocal Government Spending: Theory and Tests*. Journal of Urban Economics 35:159-174
- Jhingan, M.L. 2000. A Theory of Demand for Products Distinguished Advanced macroeconomics. Macroeconomics Theory.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World Bank.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol 49. Hal : 1-21.
- Lupia & McCubbins. 2000. *Delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal's behalf*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. 2007.. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mauro, Paolo. 1998a. Corruption and the composition of government expenditure. Journal of Public Economics 69: 263-279.
- Oates, Wallace E. 1995. Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization" by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*. Hal : 351-353

- Prawirosetoto, F.X. Yuwono, 2002. Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 2, Vol 2, FE Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33/2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 34/2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ross, Stephen A. 1973. The Economic Theory of Agency : The Principal's Problem. *American Economic Review*. Vol 3. No. 2. Hal : 134-139.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, Second Edition*, John Willey & Sons, Inc. New York.
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: LPFE UI dengan Bina Grafika.

Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.

Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413-423.

Yudoyono, Bambang. 2003. Otonomi Daerah – Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



No	Nama Kabupaten Dan Kota	PE (Miliar Rupiah)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kabupaten Bandung	5,02	5,61	5,55	6,85	6	5,3
2	Kabupaten Garut	2,7	4,01	4,16	4,11	6,76	4,69
3	Kabupaten Tasikmalaya	3,44	3,52	6,83	4,01	4,33	4,02
4	Kabupaten Kuningan	3,5	4,04	4,08	4,12	1,22	4,29
5	Kabupaten Majalengka	3,25	4,08	4,46	4,18	4,87	4,57
6	Kabupaten Sumedang	3,93	4,31	4,52	4,17	4,64	4,58
7	Kabupaten Indramayu	4,76	4,16	4,25	5,1	5,62	5,08
8	Kabupaten Bayumas	3,71	4,17	3,21	4,48	5,3	5,41
9	Kabupaten Purbalingga	3,14	3,34	4,18	5,06	6,19	5,3
10	Kabupaten Banjarnegara	2,94	3,81	3,95	4,35	5,01	4,98
11	Kabupaten Kebumen	2,93	1,18	3,2	4,08	4,52	5,61
12	Kabupaten Wonosobo	2,28	2,34	3,19	3,23	3,58	3,69
13	Kabupaten Magelang	4,01	4,03	4,62	4,91	5,21	4,99
14	Kabupaten Sleman	5,08	5,25	5,03	4,5	4,61	5,13
15	Kabupaten Kediri	4,64	4,19	4,28	4,57	6,43	4,36
16	Kabupaten Pandeglang	4,56	5,18	5,84	3,29	4,48	4,29
17	Kabupaten Tangerang	4,44	6,41	7	6,88	4,09	5,09
18	Kabupaten Jembrana	3,58	4,86	5	4,52	5,11	5,05
19	Kabupaten Tabanan	4,91	4,73	5,96	5,25	5,76	5,22
20	Kabupaten Gianyar	3,33	4,95	5,47	5,2	5,89	5,9
21	Kabupaten Klungkung	3,1	4,67	5,41	5,03	5,54	5,07
22	Kabupaten Bangli	3,38	4,03	4,46	4,25	4,48	4,02
23	Kabupaten Karang Asem	4,05	4,49	5,13	4,8	5,2	5,07
24	Kabupaten Buleleng	4,84	4,98	5,6	5,35	5,82	5,84
25	Kota Bogor	6,07	6,1	6,12	6,03	6,09	5,98
26	Kota Sukabumi	5,39	5,77	5,95	6,23	6,51	6,11
27	Kota Cirebon	4,27	4,66	4,89	5,54	6,17	5,64
28	Kota Cimahi	4,18	4,34	4,56	4,82	5,03	4,77
29	Kota Tasikmalaya	4,43	4,99	4,02	5,11	5,98	5,7
30	Kota Magelang	3,74	3,71	4,33	2,44	5,17	5,05
31	Kota Surakarta	6,11	5,8	5,15	5,43	5,82	5,69
32	Kota Pekalongan	3,86	4,07	3,82	3,06	3,8	3,73
33	Kota Yogyakarta	4,76	5,05	4,83	3,97	4,46	5,12
34	Kota Kediri	3,86	5,75	0,25	5,19	4,51	4,66
35	Kota Blitar	5,57	5,83	5,71	5,89	6,19	6,29
36	Kota Malang	4,3	5,86	5,65	6,01	6,21	6,18
37	Kota Probolinggo	3,76	5,63	5,67	5,92	6,39	5,9
38	Kota Mojokerto	5,64	2,82	5,48	2,51	5,98	5,27
39	Kota Batu	4,44	5,49	6,4	6,89	6,79	7,05

No	Kabupaten	PAD (000 Rupiah)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kabupaten Bandung	99.760.580	108.065.258	108.322.350	123.650.270	147.630.987	144.660.409
2	Kabupaten Garut	34.702.097	40.968.820	42.535.023	44.658.797	76.880.011	77.905.506
3	Kabupaten Tasikmalaya	18.659.211	18.659.209	22.715.200	22.846.210	34.725.529	47.194.342
4	Kabupaten Kuningan	20.511.178	24.394.802	31.148.898	35.040.910	43.507.886	48.954.140
5	Kabupaten Majalengka	23.867.349	26.617.894	32.270.217	39.158.820	44.187.840	51.174.860
6	Kabupaten Sumedang	42.201.185	45.953.830	58.699.240	59.677.264	75.741.768	88.256.488
7	Kabupaten Indramayu	34.037.594	38.119.801	40.274.130	41.901.690	47.704.563	56.770.811
8	Kabupaten Bayumas	45.298.682	39.565.452	63.767.247	58.338.908	96.619.572	107.425.765
9	Kabupaten Purbalingga	28.300.571	32.998.025	40.755.770	42.521.949	52.727.439	60.307.577
10	Kabupaten Banjarnegara	25.303.143	26.756.652	34.210.831	30.575.319	42.255.838	51.125.558
11	Kabupaten Kebumen	60.223.581	24.504.342	31.707.792	35.410.075	54.260.879	58.599.425
12	Kabupaten Wonosobo	24.385.836	24.276.915	23.335.686	24.445.686	36.582.606	41.898.319
13	Kabupaten Magelang	35.808.180	40.822.397	52.858.630	51.308.578	35.814.844	78.119.511
14	Kabupaten Sleman	52.978.731	54.913.300	71.278.644	86.472.070	115.311.154	152.839.968
15	Kabupaten Kediri	33.195.972	29.965.596	35.894.029	42.961.352	53.685.793	61.186.214
16	Kabupaten Pandeglang	14.770.233	14.915.969	12.710.784	23.254.917	28.004.988	33.480.446
17	Kabupaten Tangerang	124.662.339	157.424.704	198.989.672	184.212.500	249.063.806	285.899.513
18	Kabupaten Jembrana	11.055.956	9.785.500	10.474.690	11.202.090	17.871.028	21.235.505
19	Kabupaten Tabanan	34.573.611	40.022.960	42.403.134	44.153.781	48.937.969	54.675.811
20	Kabupaten Gianyar	37.131.725	47.818.379	55.006.502	60.989.877	78.880.121	96.922.244
21	Kabupaten Klungkung	12.233.725	11.765.694	16.374.121	14.290.196	22.813.860	29028565
22	Kabupaten Bangli	7.962.248	7.148.732	7.692.953	7.577.044	11.214.405	12.655.751
23	Kabupaten Karang Asem	19.513.359	18.259.930	23.909.591	27.741.725	31189655	34.717.647
24	Kabupaten Buleleng	18.769.249	20.895.383	22.873.719	23.755.953	39.196.725	45.995.091
25	Kota Bogor	41.454.150	41.602.576	66.707.298	60.262.950	73.379.953	97.768.134
26	Kota Sukabumi	25.523.466	24.955.460	36.557.623	31.599.368	66.799.344	87.402.424
27	Kota Cirebon	29.349.339	33.480.397	43.137.625	49.490.350	56.923.919	65.069.398
28	Kota Cimahi	30.105.857	33.176.397	48.242.910	49.534.521	55.851.469	64.964.960
29	Kota Tasikmalaya	26.393.603	29.937.411	38.582.320	47.458.577	58.604.933	63.849.140
30	Kota Magelang	23.567.460	20.788.699	28.643.563	25.740.227	35.814.844	38.135.505
31	Kota Surakarta	54.815.684	53.637.939	66.086.576	74.940.920	89.430.977	102.989.919
32	Kota Pekalongan	13.679.476	13.430.189	15.192.711	16.132.855	25.750.108	30.096.285
33	Kota Yogyakarta	68.621.563	70.412.081	89.196.417	91.626.503	100,327,728	105,736,212
34	Kota Kediri	26.209.849	29.378.105	40.135.033	40.748.004	53.685.793	74.775.278
35	Kota Blitar	19.283.730	18.080.735	22.744.883	19.052.019	26.721.888	40.794.908
36	Kota Malang	42.094.973	46.674.040	58.740.205	56.018.885	87.115.734	83.403.547
37	Kota Probolinggo	16.312.046	16.765.127	21.141.364	25.284.297	35.428.918	41.850.665
38	Kota Mojokerto	11.021.537	13.007.951	13.358.637	13.843.640	18.331.133	22.437.275
39	Kota Batu	7.194.246	6.921.533	8.415.308	11.019.123	14.944.426	18.625.013

No	Kabupaten	DAU (000 Rupiah)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kabupaten Bandung	726.240.000	757.290.000	802.830.000	1.168.636.000	1.351.912.000	1.001.542.000
2	Kabupaten Garut	468.170.000	490.610.000	520.631.000	830.714.880	911.801.000	1.002.247.586
3	Kabupaten Tasikmalaya	375.630.000	375.630.000	411.220.000	648.149.000	718.561.000	789.565.000
4	Kabupaten Kuningan	282.600.000	293.530.000	308.582.000	485.246.000	550.002.396	586.883.970
5	Kabupaten Majalengka	295.270.000	308.162.000	328.468.000	508.346.000	555.540.000	600.795.440
6	Kabupaten Sumedang	291.220.000	301.090.000	316.698.000	500.020.000	551.711.000	608.993.530
7	Kabupaten Indramayu	320.800.000	333.712.000	350.810.000	548.042.000	610.890.996	682.130.000
8	Kabupaten Bayumas	381.941.933	374.870.000	404.114.000	600.000.000	654.154.000	702.152.000
9	Kabupaten Purbalingga	254.460.360	246.690.000	282.267.980	383.925.000	488.217.134	450.743.000
10	Kabupaten Banjarnegara	248.820.000	260.996.000	276.999.000	422.509.000	425.544.000	488.707.056
11	Kabupaten Kebumen	315.400.000	339.720.000	362.789.000	536.689.000	585.365.000	616.395.049
12	Kabupaten Wonosobo	237.249.611	246.091.317	254.864.000	359.723.000	389.671.000	427.667.185
13	Kabupaten Magelang	300.629.991	327.499.809	345.991.000	502.945.000	548.521.000	588.001.786
14	Kabupaten Sleman	304.780.000	307.330.000	318.139.000	485.397.000	543.065.000	592.595.000
15	Kabupaten Kediri	347.730.000	358.233.000	380.907.000	583.284.000	635.830.000	682.047.000
16	Kabupaten Pandeglang	290.133.517	288.106.372	314.687.000	480.690.000	524.411.000	580.210.000
17	Kabupaten Tangerang	367.010.000	401.160.000	448.770.000	508.216.000	693.643.000	774.453.991
18	Kabupaten Jembrana	137.389.961	144.661.000	156.827.000	255.025.000	278.583.000	304.078.638
19	Kabupaten Tabanan	203.699.965	211.284.518	212.991.000	333.754.000	371.722.000	416.172.072
20	Kabupaten Gianyar	203.642.037	193.933.000	198.172.000	314.673.000	347.800.000	385.188.000
21	Kabupaten Klungkung	120.620.000	124.218.000	134.371.000	223.587.000	247.320.999	276.182.564
22	Kabupaten Bangli	122.390.000	126.374.000	130.689.494	213.228.000	233.791.000	262.885.446
23	Kabupaten Karang Asem	163.260.000	170.302.000	180.482.000	286.423.000	313.036.000	349.814.538
24	Kabupaten Buleleng	237.610.000	248.515.000	258.283.000	422.816.000	468.732.000	504.734.000
25	Kota Bogor	197.420.000	201.110.000	214.806.000	302.515.000	359.576.514	397.367.000
26	Kota Sukabumi	124.630.000	126.820.000	134.188.000	216.741.000	285.095.000	278.944.000
27	Kota Cirebon	147.400.014	141.230.000	143.039.000	259.313.000	304.470.000	340.669.127
28	Kota Cimahi	140.543.176	152.091.000	161.663.000	223.860.000	270.849.000	305.008.920
29	Kota Tasikmalaya	189.170.000	203.950.000	205.408.000	320.075.000	373.869.708	406.141.000
30	Kota Magelang	119.980.000	122.298.000	125.606.000	216.062.000	235.917.000	256.525.340
31	Kota Surakarta	215.280.000	218.045.000	218.082.000	334.287.000	374.501.000	420.912.000
32	Kota Pekalongan	122.170.000	125.408.000	132.335.000	209.651.000	235.899.000	264.051.790
33	Kota Yogyakarta	196.100.000	197.787.000	201.231.000	316.832.000	365.042.000	411.257.230
34	Kota Kediri	118.740.000	119.259.000	131.453.000	359.132.000	350.377.000	400.161.615
35	Kota Blitar	111.770.000	111.770.000	121.252.000	170.379.000	194.040.000	217.166.000
36	Kota Malang	204.790.000	211.630.000	221.130.000	367.435.000	417.300.000	473.050.000
37	Kota Probolinggo	109.391.738	112.602.534	117.368.000	199.720.000	226.917.681	250.880.000
38	Kota Mojokerto	114.335.352	109.540.000	111.550.000	198.635.000	212.039.000	222.502.000
39	Kota Batu	87.420.000	99.340.000	104.489.000	159.797.000	188.025.000	215.977.808

No	Kabupaten	DAK (000 Rupiah)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kabupaten Bandung	1.000.000	1.000.000	4.000.000	18.080.000	9.488.100	11.012.000
2	Kabupaten Garut	1.000.000	2.500.000	15.513.058	24.042.471	71.319.041	96.486.000
3	Kabupaten Tasikmalaya	1.000.000	1.000.000	33.709.020	59.183.975	69.774.000	67.305.000
4	Kabupaten Kuningan	7.800.000	7.420.000	13.530.000	27.330.000	49.743.000	64.718.000
5	Kabupaten Majalengka	7.300.000	9.180.000	13.310.000	35.020.000	49.512.000	49.558.000
6	Kabupaten Sumedang	8.600.000	7.210.000	13.240.000	31.910.000	43.785.000	43.785.000
7	Kabupaten Indramayu	11.600.000	13.490.000	16.460.000	38.680.000	12.396.000	12.397.000
8	Kabupaten Bayumas	5.800.000	8.620.000	12.860.000	30.250.000	10.497.293	10.146.000
9	Kabupaten Purbalingga	6.100.000	12.630.000	13.000.000	27.440.000	39.606.000	51.047.000
10	Kabupaten Banjarnegara	7.100.000	7.300.000	13.140.000	31.865.000	44.339.000	58.868.000
11	Kabupaten Kebumen	7.700.000	11.898.795	13.480.000	29.060.000	52.203.000	66.405.000
12	Kabupaten Wonosobo	5.600.000	7.860.000	11.980.176	45.890.000	45.472.700	57.280.000
13	Kabupaten Magelang	5.000.000	11.500.000	11.950.000	32.080.000	48.654.000	48.654.000
14	Kabupaten Sleman	10.600.000	9.480.000	10.600.000	25.800.000	15.764.533	10.151.000
15	Kabupaten Kediri	7.195.000	5.000.000	14.290.000	11.830.000	10.032.000	10.032.000
16	Kabupaten Pandeglang	5.000.000	14.520.000	18.110.000	29.020.000	51.052.000	61.563.000
17	Kabupaten Tangerang	1.000.000	6.500.000	4.000.000	12.680.000	55.131.000	55.057.000
18	Kabupaten Jembrana	6.300.000	10.590.000	12.730.000	25.400.000	42.697.000	50.121.000
19	Kabupaten Tabanan	10.699.915	12.090.000	13.040.000	26.850.000	46.229.000	55.364.000
20	Kabupaten Gianyar	999,95	5.000.000	12.620.000	30.530.000	43.147.000	50.927.000
21	Kabupaten Klungkung	4.300.000	10.850.000	9.750.000	28.020.000	39.171.900	47.704.000
22	Kabupaten Bangli	2.702.043	7.000.000	9.920.000	23.740.000	36.465.000	42.595.000
23	Kabupaten Karang Asem	6.300.000	10.130.000	11.380.000	27.760.000	46.776.000	55.832.000
24	Kabupaten Buleleng	7.300.000	11.370.000	13.350.000	30.090.000	49.861.000	59.691.000
25	Kota Bogor	4.100.000	5.500.000	4.000.000	7.620.000	7.587.700	14.056.000
26	Kota Sukabumi	6.100.000	5.500.000	7.290.000	17.270.000	21.715.000	27.248.000
27	Kota Cirebon	4.200.000	5.530.000	7.210.000	17.830.000	29.207.000	35.592.000
28	Kota Cimahi	3.512.189	12.620.000	6.380.000	16.965.000	18.758.100	27.677.000
29	Kota Tasikmalaya	3.715.000	9.500.000	7.500.000	20.730.000	24.424.000	41.726.000
30	Kota Magelang	7.700.000	5.500.000	7.900.000	10.450.000	22.923.000	27.950.000
31	Kota Surakarta	4.700.000	5.500.000	9.931.000	16.470.000	25.900.400	31.007.000
32	Kota Pekalongan	5.000.000	5.500.000	7.220.000	17.510.000	28.681.000	35.145.000
33	Kota Yogyakarta	4.200.000	5.500.000	6.600.000	4.800.000	26.788.000	32.238.000
34	Kota Kediri	3.600.000	5.500.000	6.810.000	17.640.000	23.891.000	23.891.000
35	Kota Blitar	5.894.450	5.894.500	7.030.000	16.480.000	26.933.900	32.878.000
36	Kota Malang	7.100.000	5.500.000	7.775.000	20.860.000	26.943.000	31.782.000
37	Kota Probolinggo	3.900.000	5.500.000	10.640.000	22.350.000	26.669.000	31.178.000
38	Kota Mojokerto	3.900.000	9.500.000	9.980.000	20.310.000	20.558.000	26.781.000
39	Kota Batu	3.515.000	12.880.000	10.650.000	17.910.000	26.712.600	30.520.000

No	Kabupaten	Surplus/Defisit					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kabupaten Bandung	59439620	-112045721	65.868.510	82.883.180	135.447.836	-50.223.954
2	Kabupaten Garut	-15319243	16891048	-6.417.260	-740.203	68.855.960	76.416.875
3	Kabupaten Tasikmalaya	33155841	33155841	2.353.210	48.688.511	18.252.011	-44.303.562
4	Kabupaten Kuningan	-4120170	-916165	-6.253.759	-19.948.140	50.792.231	39.505.042
5	Kabupaten Majalengka	-3483994	-10858538	11.280.184	-12.801.550	77.577.439	37.866.089
6	Kabupaten Sumedang	-4700788	-5334091	-2.450.053	-23.792.930	40.065.687	-51.017.113
7	Kabupaten Indramayu	-30614847	6660797	50.779.340	6.915.380	25.614.633	-55.353.004
8	Kabupaten Bayumas	6135434	-31587701	33.296.373	15.812.159	-1.338.011	-71.465.843
9	Kabupaten Purbalingga	-21534169	-24209175	19.632.583	23.429.139	128.378.319	37.606.907
10	Kabupaten Banjarnegara	4305979	-61672891	777.789	10.067.452	20.433.343	39.379.110
11	Kabupaten Kebumen	-17918399	-31887929	65.693.780	20.448.789	-80.253.393	-37.647.070
12	Kabupaten Wonosobo	-56217055	-60021163	-3.076.511	27.450.335	31.246.382	19.801.753
13	Kabupaten Magelang	-36828652	-11405078	16.932.587	10.242.481	29.515.984	-46.706.985
14	Kabupaten Sleman	5374101	-61300851	15.881.392	60.413.660	98.682.081	-122.768.636
15	Kabupaten Kediri	-31013552	-16069488	67.225.240	79.167.257	30.260.837	-37.480.456
16	Kabupaten Pandeglang	-244939	-3062330	10.646.587	-14.002.452	-112.672.423	71.755.793
17	Kabupaten Tangerang	-38613479	-58858226	238.509.228	-137.239.299	215.906.638	252.231.316
18	Kabupaten Jembrana	-17883743	-27755913	-10.491.916	9.365.230	2.689.421	-2.037.567
19	Kabupaten Tabanan	-21269929	-3590515	18.357.953	-4.129.145	24.349.861	-33.706.078
20	Kabupaten Gianyar	-5349967	-22716285	3.740.778	11.032.877	15.385.167	-37.474.622
21	Kabupaten Klungkung	1208362	-11329054	12.184.763	12.748.086	1.430.120	-10.647.004
22	Kabupaten Bangli	-5351623	-10159000	7.221.057	4.071.444	20.083.127	10.178.443
23	Kabupaten Karang Asem	-10513715	-28128718	27.575.042	-8.539.199	24.438.881	10.181.989
24	Kabupaten Buleleng	-29580557	-14586386	24.059.653	9.614.472	-1.867.629	15.483.815
25	Kota Bogor	3889620	-6651930	35.990.166	-6.168.893	-4.617.997	-69.467.397
26	Kota Sukabumi	-277335	-13183476	10.226.621	-833.651	39.417.396	8.431.325
27	Kota Cirebon	-1150618	-4925001	21.961.510	40.785.070	14.324.970	7.125.842
28	Kota Cimahi	37514703	-31533191	6.343.850	4.447.426	6.175.517	-32.224.130
29	Kota Tasikmalaya	9178262	-13737640	5.647.450	19.468.967	20.110.188	-33.340.750
30	Kota Magelang	-1811	-23990402	19.985.038	29.373.545	8.800.178	21.665.298
31	Kota Surakarta	-2407104	12234051	33.534.757	25.606.650	-252.319.645	-343.157.161
32	Kota Pekalongan	3783298	-8275214	13.055.595	10.580.987	16.184.165	-18.771.534
33	Kota Yogyakarta	33279729	-74062755	-7.357.702	17.114.804	44.168.608	67.806.612
34	Kota Kediri	-23780292	-10461321	-6.586.343	7.198.426	-2.732.422	-38.220.897
35	Kota Blitar	735950	3901132	3.013.265	4.716.273	-11.142.713	-32.530.663
36	Kota Malang	6410915	-15560411	-7.684.753	22.801.632	32.841.533	-24.971.420
37	Kota Probolinggo	-8604977	-18134259	3.700.985	22.213.031	2.331.999	-9.670.432
38	Kota Mojokerto	2228097	-4400000	-7.771.369	31.637.950	53.577.537	-24.620.591
39	Kota Batu	105684	-17490614	7.964.537	9.336.702	29.397.304	6.495.092

No	Kabupaten	Dependen Variabel					
		Belanja Modal (000 Rupiah)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kabupaten Bandung	48.802.219	132.243.449	53.197.510	263.349.014	370.894.040	198.387.000
2	Kabupaten Garut	63.974.260	63.745.774	34.541.915	59.370.284	218.555.522	256.264.913
3	Kabupaten Tasikmalaya	62.042.171	62.042.171	85.212.801	208.873.938	227.324.557	165.334.000
4	Kabupaten Kuningan	40.124.481	21.380.000	18.754.085	73.294.098	111.637.195	67.906.568
5	Kabupaten Majalengka	36.572.513	28.234.177	29.540.376	59.793.798	201.555.244	150.483.530
6	Kabupaten Sumedang	50.015.338	29.816.788	63.694.885	102.677.471	100.041.004	86.369.359
7	Kabupaten Indramayu	114.845.916	59.558.874	64.916.040	140.026.627	219.649.946	193.365.000
8	Kabupaten Bayumas	45.003.645	35.721.689	52.212.557	85.048.779	141.468.694	145.456.000
9	Kabupaten Purbalingga	87.013.772	93.794.767	32.259.157	83.231.981	120.332.563	179.944.000
10	Kabupaten Banjarnegara	54.843.796	34.510.055	52.387.861	94.040.623	128.759.799	124.821.170
11	Kabupaten Kebumen	91.312.115	64.538.305	40.043.893	141.762.333	239.840.266	183.039.804
12	Kabupaten Wonosobo	114.140.047	83.578.849	68.118.285	91.672.142	137.530.557	147.090.448
13	Kabupaten Magelang	32.443.719	37.530.113	42.996.467	103.934.555	128.210.809	121.992.297
14	Kabupaten Sleman	41.041.208	55.657.909	58.061.665	92.722.513	109.560.195	76.069.000
15	Kabupaten Kediri	154.339.488	107.274.034	45.312.517	202.169.143	173.492.141	317.945.000
16	Kabupaten Pandeglang	97.750.073	61.132.994	28.954.336	284.321.106	261.243.139	86.457.000
17	Kabupaten Tangerang	94.284.333	15.169.915	223.676.164	564.433.606	513.722.184	368.280.453
18	Kabupaten Jembrana	32.991.408	30.869.236	30.151.821	103.303.896	81.877.846	73.966.561
19	Kabupaten Tabanan	36.488.265	19.861.159	8.983.210	31.879.056	57.982.945	59.317.010
20	Kabupaten Gianyar	52.533.148	34.856.663	23.263.715	58.192.490	89.843.952	103.436.000
21	Kabupaten Klungkung	36.750.531	35.350.118	32.036.606	54.604.499	89.875.086	68.077.780
22	Kabupaten Bangli	28.523.323	21.654.403	11.051.761	30.156.150	86.158.379	87.750.723
23	Kabupaten Karang Asem	41.323.629	27.615.278	16.533.975	49.753.930	95.395.068	156.760.283
24	Kabupaten Buleleng	73.593.710	38.169.948	28.055.921	67.455.822	64.332.937	86.811.000
25	Kota Bogor	79.854.654	26.821.472	28.106.032	75.785.135	112.306.885	118.662.000
26	Kota Sukabumi	34.784.877	29.520.797	37.812.415	64.493.008	68.838.591	108.924.000
27	Kota Cirebon	57.898.202	27.591.353	26.984.274	66.321.076	89.749.744	99.626.459
28	Kota Cimahi	56.944.314	45.075.474	65.421.724	68.268.363	100.877.999	117.364.200
29	Kota Tasikmalaya	25.313.231	30.824.184	44.061.990	87.146.506	105.770.334	88.964.206
30	Kota Magelang	49.719.537	27.034.903	13.815.862	27.064.821	74.579.045	117.475.362
31	Kota Surakarta	44.315.011	6.378.733	8.440.158	56.419.901	60.719.123	83.065.000
32	Kota Pekalongan	51.590.433	37.882.463	24.046.097	46.375.121	78.157.377	77.224.248
33	Kota Yogyakarta	41.117.456	56.004.155	55.621.387	89.348.930	89.982.394	97.071.539
34	Kota Kediri	56.796.149	36.300.361	28.167.113	69.872.006	193.731.015	120.211.179
35	Kota Blitar	47.988.714	50.511.449	26.492.339	52.921.316	84.469.837	80.887.000
36	Kota Malang	36.665.856	26.241.465	67.262.215	87.058.856	149.646.822	203.923.000
37	Kota Probolinggo	46.923.621	18.730.263	25.438.152	32.182.231	117.894.079	105.619.000
38	Kota Mojokerto	39.044.917	21.127.704	14.414.992	23.897.800	45.215.895	105.822.000
39	Kota Batu	34.140.009	20.664.358	24.658.048	30.082.817	79.094.504	96.445.721

## Descriptives

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	195	6.378.733,00	564.433.606,00	91.076.663,53	80.738.592,96
LAJU_PDRB	195	0,25	7,32	4,73	1,13
PAD	195	6.921.533,00	249.063.806,00	42.883.648,60	33.875.828,43
DAU	195	87.420.000,00	1.351.912.000,00	315.759.605,06	188.907.421,63
DAK	195	99.995,00	71.319.041,00	16.611.430,02	14.258.758,08
SURPLUS/DEFISIT	195	-252.319.645,00	238.509.228,00	5.884.532,33	44.766.404,14
Valid N (listwise)	195				



## Regression

### Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SURPLUS/DEFISIT, LAJU_PDRB, DAK, PAD, DAU <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 <sup>a</sup>	.558	.546	5.44046E7	1.996

a. Predictors: (Constant), SURPLUS/DEFISIT, LAJU\_PDRB, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.052E17	5	1.410E17	47.652	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.594E17	189	2.960E15		
	Total	1.265E18	194			

a. Predictors: (Constant), SURPLUS/DEFISIT, LAJU\_PDRB, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.768E7	1.785E7		-2.672	.008
	LAJU_PDRB	9401010.477	3647502.222	.132	2.577	.011
	PAD	.793	.151	.333	5.249	.000
	DAU	.134	.029	.313	4.672	.000
	DAK	.996	.317	.176	3.141	.002
	SURPLUS/DEFISIT	.251	.093	.139	2.695	.008

a. Dependent Variable: BM

**Coefficients<sup>a</sup>**

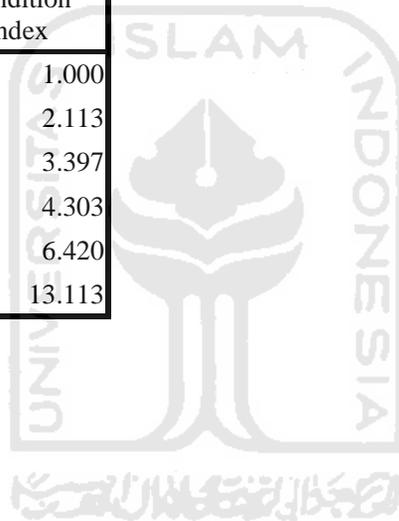
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LAJU_PDRB	.898	1.114
	PAD	.583	1.716
	DAU	.520	1.923
	DAK	.747	1.339
	SURPLUS/DEFISI T	.877	1.140

a. Dependent Variable: BM

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

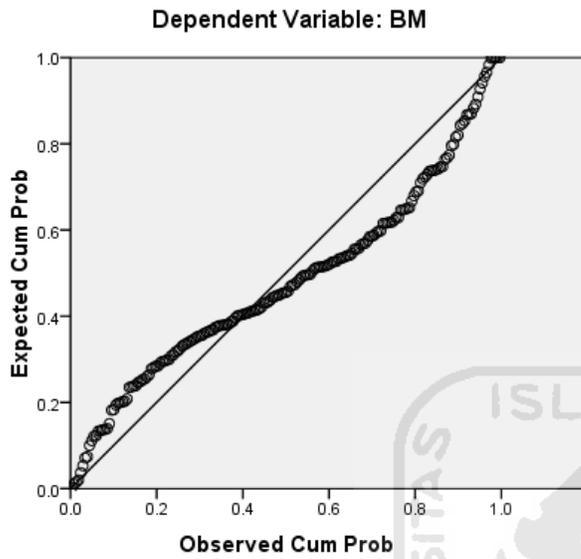
Model	Dimen sion		
		Eigenvalue	Condition Index
1	1	4.302	1.000
	2	.964	2.113
	3	.373	3.397
	4	.232	4.303
	5	.104	6.420
	6	.025	13.113

a. Dependent Variable: BM

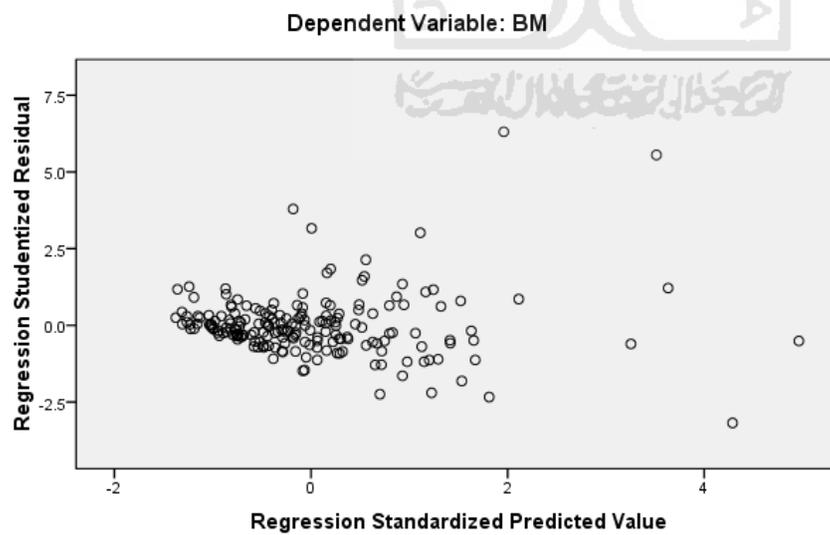


## Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Tabel Durbin-Watson Statistic : 5 percent significant points of dL and dU

N	K=1		K=2		K=3		K=4		K=5		K=6		K=7		K=8		K=9		K=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.610	1.400																		
7	0.700	1.356	0.467	1.896																
8	0.763	1.332	0.559	1.777	0.368	2.287														
9	0.824	1.320	0.629	1.699	0.455	2.128	0.296	2.588												
10	0.879	1.320	0.697	1.641	0.525	2.016	0.376	2.414	0.243	2.822										
11	0.927	1.324	0.758	1.604	0.595	1.928	0.444	2.283	0.316	2.645	0.203	3.005								
12	0.971	1.331	0.812	1.579	0.658	1.864	0.512	2.177	0.379	2.506	0.268	2.832	0.171	3.149						
13	1.010	1.340	0.861	1.562	0.715	1.816	0.574	2.094	0.445	2.390	0.328	2.692	0.230	2.985	0.147	3.266				
14	1.045	1.350	0.905	1.551	0.767	1.779	0.632	2.030	0.505	2.296	0.389	2.572	0.286	2.848	0.200	3.111	0.127	3.360		
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.220	0.447	2.472	0.343	2.727	0.251	2.979	0.175	3.216	0.111	3.438
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.157	0.502	2.388	0.398	2.624	0.304	2.860	0.222	3.090	0.155	3.304
17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.104	0.554	2.318	0.451	2.537	0.356	2.757	0.272	2.975	0.198	3.184
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.060	0.603	2.257	0.502	2.461	0.407	2.667	0.321	2.873	0.244	3.073
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.023	0.649	2.206	0.459	2.396	0.456	2.589	0.369	2.783	0.290	2.974
20	1.120	1.411	1.100	1.537	0.998	1.676	0.894	1.828	0.792	1.991	0.692	2.162	0.595	2.339	0.502	2.521	0.416	2.704	0.336	2.885
21	1.221	1.420	1.125	1.538	1.026	1.669	0.927	1.812	0.829	1.964	0.732	2.124	0.637	2.290	0.547	2.460	0.461	2.633	0.380	2.806
22	1.239	1.429	1.147	1.541	1.053	1.664	0.958	1.797	0.863	1.940	0.769	2.090	0.677	2.246	0.588	2.407	0.504	2.571	0.424	2.734
23	1.257	1.437	1.168	1.543	1.078	1.660	0.986	1.785	0.895	1.920	0.804	2.061	0.715	2.208	0.628	2.360	0.545	2.514	0.465	2.670
24	1.273	1.446	1.188	1.546	1.101	1.656	1.013	1.775	0.925	1.902	0.837	2.033	0.751	2.174	0.666	2.318	0.584	2.464	0.506	2.613
25	1.288	1.454	1.206	1.550	1.123	1.654	1.038	1.767	0.953	1.886	0.868	2.012	0.784	2.144	0.702	2.280	0.621	2.419	0.544	2.560
26	1.302	1.461	1.224	1.553	1.143	1.652	1.062	1.759	0.979	1.873	0.897	1.992	0.816	2.117	0.735	2.246	0.657	2.379	0.581	2.513
27	1.316	1.469	1.240	1.556	1.162	1.651	1.084	1.753	1.004	1.861	0.925	1.974	0.845	2.093	0.767	2.216	0.691	2.342	0.616	2.470
28	1.328	1.476	1.255	1.560	1.181	1.650	1.104	1.747	1.028	1.850	0.951	1.958	0.874	2.071	0.798	2.188	0.723	2.309	0.650	2.431
29	1.341	1.483	1.270	1.563	1.198	1.650	1.124	1.743	1.050	1.841	0.975	1.944	0.900	2.052	0.826	2.164	0.753	2.278	0.682	2.396
30	1.352	1.489	1.284	1.567	1.214	1.650	1.143	1.739	1.071	1.833	0.998	1.931	0.926	2.034	0.854	2.141	0.782	2.251	0.712	2.363
31	1.363	1.496	1.297	1.570	1.229	1.650	1.160	1.735	1.090	1.825	1.020	1.920	0.950	2.018	0.879	2.120	0.810	2.226	0.741	2.333
32	1.373	1.502	1.309	1.574	1.244	1.650	1.177	1.732	1.109	1.819	1.041	1.909	0.972	2.004	0.904	2.102	0.836	2.203	0.769	2.306
33	1.383	1.508	1.321	1.577	1.258	1.651	1.193	1.730	1.127	1.813	1.061	1.900	0.994	1.991	0.927	2.085	0.861	2.181	0.795	2.281
34	1.393	1.514	1.333	1.580	1.271	1.652	1.208	1.728	1.144	1.808	1.080	1.891	1.015	1.979	0.950	2.069	0.885	2.162	0.821	2.257
35	1.402	1.519	1.343	1.584	1.283	1.653	1.222	1.726	1.160	1.803	1.097	1.884	1.034	1.967	0.971	2.054	0.908	2.144	0.845	2.236
36	1.411	1.525	1.354	1.587	1.295	1.654	1.236	1.724	1.175	1.799	1.114	1.877	1.053	1.957	0.991	2.041	0.930	2.127	0.868	2.216
37	1.419	1.530	1.364	1.590	1.307	1.655	1.249	1.723	1.190	1.795	1.131	1.870	1.071	1.948	1.011	2.029	0.951	2.112	0.791	2.197
38	1.427	1.535	1.373	1.594	1.318	1.656	1.261	1.722	1.204	1.792	1.146	1.864	1.088	1.939	1.029	2.017	0.970	2.098	0.912	2.180
39	1.435	1.540	1.382	1.597	1.328	1.658	1.273	1.722	1.218	1.789	1.161	1.859	1.104	1.932	1.047	2.007	0.990	2.085	0.932	2.164
40	1.442	1.544	1.391	1.600	1.338	1.659	1.285	1.721	1.230	1.786	1.175	1.854	1.120	1.924	1.064	1.997	1.008	2.072	0.945	2.149
45	1.475	1.566	1.430	1.615	1.383	1.666	1.336	1.720	1.287	1.776	1.238	1.835	1.189	1.895	1.139	1.958	1.089	2.002	1.038	2.088
50	1.503	1.585	1.462	1.628	1.421	1.674	1.378	1.721	1.335	1.771	1.291	1.822	1.246	1.875	1.201	1.930	1.156	1.986	1.110	2.044
55	1.528	1.601	1.490	1.641	1.452	1.681	1.414	1.724	1.374	1.768	1.334	1.814	1.294	1.861	1.253	1.909	1.212	1.959	1.170	2.010
60	1.549	1.616	1.514	1.652	1.480	1.689	1.444	1.727	1.408	1.767	1.372	1.808	1.335	1.850	1.298	1.894	1.260	1.939	1.222	1.984
65	1.567	1.629	1.536	1.662	1.503	1.696	1.471	1.731	1.438	1.767	1.404	1.805	1.370	1.843	1.336	1.882	1.301	1.923	1.266	1.964
70	1.583	1.641	1.554	1.672	1.525	1.703	1.494	1.735	1.464	1.768	1.433	1.802	1.401	1.837	1.369	1.873	1.337	1.910	1.305	1.948
75	1.598	1.652	1.571	1.680	1.543	1.709	1.515	1.739	1.487	1.770	1.458	1.801	1.428	1.834	1.399	1.867	1.369	1.901	1.339	1.935
80	1.611	1.662	1.586	1.688	1.560	1.715	1.534	1.743	1.507	1.772	1.480	1.801	1.453	1.831	1.425	1.861	1.397	1.893	1.369	1.925
85	1.624	1.671	1.600	1.696	1.575	1.721	1.550	1.747	1.525	1.774	1.500	1.801	1.474	1.829	1.448	1.857	1.422	1.886	1.396	1.916
90	1.635	1.679	1.612	1.703	1.589	1.726	1.566	1.751	1.542	1.776	1.518	1.801	1.494	1.827	1.469	1.854	1.445	1.881	1.420	1.909
95	1.645	1.687	1.623	1.709	1.602	1.732	1.579	1.755	1.557	1.778	1.535	1.802	1.512	1.827	1.489	1.852	1.465	1.877	1.442	1.903
100	1.654	1.694	1.634	1.715	<b>1.613</b>	<b>1.736</b>	1.592	1.758	1.571	1.780	1.550	1.803	1.528	1.826	1.506	1.850	1.484	1.874	1.462	1.898
150	1.720	1.746	1.706	1.760	1.693	1.774	1.679	1.788	1.665	1.802	1.651	1.817	1.637	1.832	1.622	1.847	1.608	1.868	1.574	1.877
200	1.758	1.778	1.748	1.789	1.738	1.799	1.728	1.810	1.718	1.820	1.707	1.831	1.697	1.841	1.686	1.832	1.675	1.863	1.665	1.874

Sumber : Sritua Arief , 1993 : 295